

REFORMASI KELEMBAGAAN DAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN  
PEDESAAN<sup>1</sup>  
Kajian pada Kasus Agribisnis Padi Sawah

Tri Pranadji

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian  
Jl. A. Yani 70 Bogor 16161

PENDAHULUAN

Dalam 3-4 dekade terakhir terdapat dua peristiwa pergolakan politik berskala besar, yaitu berkaitan dengan pergantian pemerintahan (dari Orde Lama ke Orde Baru dan dari Orde Baru ke "Orde Reformasi"), yang di dalamnya terkandung adanya krisis pangan (terutama ketersediaan beras) yang relatif berat. Dalam keadaan masyarakat di sekitar perkotaan (Jawa) dihadapkan pada kesulitan memperoleh bahan pangan ("beras"), maka bayangan jebakan "krisis subsistensi" (Scott, 1989) bersamaan dengan krisis ekonomi (1998) benar-benar menjadi kenyataan. Sejak memasuki dekade 1990-an memang terasa ada semacam "kelalaian politik" untuk mempertahankan spirit berswasembada beras secara nasional (yang telah dicapai pada 1984), dan kelalaian itu saat ini harus dibayar mahal oleh masyarakat pedesaan dalam bentuk keterbelakangannya di bidang ekonomi.

Untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi pedesaan yang sudah menahun ini diperlukan langkah reformatif, atau menurut istilah Kuhn (1967) disebut revolusi paradigma (kelembagaan pedesaan). Langkah yang sifatnya "tambal sulam" atau setengah hati justru hanya akan membuang-buang waktu dan memboroskan sumberdaya yang ada. Reformasi (reform, reformation; Bahasa Inggris; Guralnik and Neufeldt, 1988) kelembagaan dalam paper ini dapat diartikan sebagai "to make (performance of rural economics intitutions) better by putting or stop for abuses or malpractices or by introducing better institutions". Lebih lengkap lagi jika makna reformasi kelembagaan ekonomi ini terkait erat dengan reformasi di bidang kehidupan sosial dan politik di pedesaan; "... an (institutional) movement aimed at removing political or social abuses ... and and improvement in institutional character and conduct".

Dewasa ini gejala kehancuran ekonomi padi sawah di Indonesia, yang berawal dari kemorosotan efisiensinya, telah membayang di depan mata. Yang perlu dicemaskan dari kehancuran ekonomi padi sawah tadi bukanlah hanya pada besarnya devisa yang akan terkuras untuk impor beras; melainkan pada "efek domino" yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya dan

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Peluang Indonesia untuk Mencukupi Sendiri Kebutuhan Beras Nasionalnya", Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian. Jum'at, 2 Oktober 2003 di Bogor.

politik. Bukan tidak mungkin dalam waktu singkat “efek domino” tadi akan menjelma menjadi kerentanan daya tahan perekonomian nasional karena rongrongan bahaya kerusuhan sosial yang meluas, semakin menajamnya konflik antara golongan “elit-minoritas” masyarakat penguasa kapital dan golongan “massa-mayoritas” papa atau tak berkapital, melemahnya solidaritas sosial, merosotnya keamanan, dan bahaya disintegrasi bangsa.

Salah satu faktor strategis yang menyebabkan daya saing perekonomian beras nasional kita relatif lemah adalah lemahnya sistem kelembagaan perekonomian pedesaan. Selama lebih dari tiga dekade sistem kelembagaan perekonomian pedesaan bukan saja tercabut dari akar budayanya, namun juga mengalami proses “pembusukan” secara sistematis. Sistem kelembagaan pedesaan yang hingga beberapa tahun terakhir secara politik masih terkooptasi oleh kebijakan pembangunan yang sangat sentralistik dan tersubordinasi oleh organisasi pemerintahan pusat (Pranadji, 1999 dan MacAdreus dan Amal, 1995) sehingga dampak sosial ekonominya masih sangat terasa. Kerugian yang sangat mahal adalah kreativitas masyarakat pedesaan (“lokal”) tidak memperoleh ruang untuk berkembang secara layak. Pada saat yang hampir bersamaan, dengan kinerja organisasi pemerintahan dan perekonomian padi secara nasional tidak efisien dan sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara sudah sangat merosot ke tingkat yang paling parah sejak 1945.

Reformasi kelembagaan pedesaan, sejalan dengan diberlakukannya otonomi (pemerintah) daerah, dapat dijadikan agenda penting untuk mengembalikan kekuatan ekonomi pedesaan. Dalam rangka meningkatkan daya saing kelembagaan dan sistem agribisnis padi sawah di pedesaan, seyogyanya makna otonomi tadi tidak terhenti pada pemerintahan tingkat kabupaten atau tingkat II, namun bahkan harus sampai di tingkat komunitas pedesaan (Pranadji, 2002). Oleh sebab itu, makna reformasi dalam bingkai otonomi daerah harus mencakup pengertian pemberian kesempatan dan kepercayaan (“trust”) pada kelembagaan lokal untuk meningkatkan kapasitas kecerdasan dan efisiensi di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi, termasuk padi sawah.

## SEJARAH: Politik dan Pangan

Interaksi “ekonomi padi” dengan institusi politik telah banyak mewarnai perjalanan bangsa Indonesia untuk menunjukkan kemandiriannya sebagai negara yang berdaulat. Pertarungan antara masyarakat Jawa (Sultan Agung) dengan orang Belanda (Jan Pieterszoon Coen) pada awal abad 17 antara lain adalah untuk memperebutkan monopoli perdagangan beras antar daerah dan negara (Ricklefs, 1981). Dengan sumberdaya alam, kekayaan biodiversitas lokal dan potensi kekuatan lembaga perekonomian masyarakat pedesaannya tidak sepantasnya jika bangsa Indonesia menggantungkan kebutuhan berasnya pada pasar luar negeri (impor) secara

berkelanjutan. Terlebih lagi jika disadari bahwa sistem produksi beras nasional kita hingga dewasa ini masih menjadi bagian integral dari perekonomian masyarakat pedesaan.

Kegagalan dalam penyediaan beras, sebagai bahan pangan strategis, akan bisa menimbulkan implikasi sosial dan politik yang bernilai sangat mahal. De Graaf (1990) dan Hall (1988) menyebutkan salah satu penyebab utama kegagalan pasukan Mataram dalam penyerangan Batavia pada perempatan awal abad 17 adalah hancurnya gudang bahan pangan dan tidak tersedianya beras di sepanjang Pantura Jawa. Kehancuran pasukan Mataram tadi bukan disebabkan oleh kekurangan semangat dan taktik perang, melainkan disebabkan tidak memadainya stok jumlah padi yang mendukung penyerangan tadi. Kelaparan dan kekurangan beras menjadi sebab utama kekalahan tentara Mataram dalam penyerbuan ke Batavia.

Akhir-akhir ini di kalangan perumus kebijakan pembangunan (ekonomi) berkembang pemikiran tentang liberalisasi pertanian, termasuk menyangkut masalah komoditas pangan strategis, khususnya padi. Ditinjau dari semangat untuk membangun perekonomian berlandaskan kekuatan sendiri, terutama untuk mencukupi kebutuhan produk pangan (terutama beras) sendiri, hal ini tidak sejalan dengan catatan historis keberadaan dan kelangsungan masyarakat Indonesia. Pengelolaan dan keorganisasian perekonomian padi nasional dewasa ini telah direduksi secara dramatik hingga tingkat kebijakan harga dasar dan penyikapan pasar terhadap relativitas harga sereal di pasar bebas. Hal ini bukan saja akan membahayakan ketahanan sistem sosial ekonomi pedesaan, namun justru akan semakin menguatkan ketergantungan pangan masyarakat Indonesia terhadap risiko ketidakpastian pasar global yang tidak bebas dari intervensi sepihak dari negara-negara besar.

Dalam suatu perkuliahan (awal 1980-an) Prof Sajogyo menceritakan bahwa pada waktu orang Belanda akan menyerang gerilyawan Jawa di pedalaman daerah Yogyakarta dan Magelang, mereka mengirimkan ahli antropologi sosial dan pertanian untuk menyelidiki kondisi masyarakat pedesaan berdasarkan tanaman padinya di lapangan. Jika tanaman padi masyarakat pedesaan bagus, maka pasukan Belanda "dilarang keras" menyerang para gerilyawan tadi karena para gerilyawan tadi akan sulit dikalahkan. Pada saat itu telah disadari bahwa padi di desa persawahan merupakan "amunisi" strategis para gerilyawan untuk bertahan dan memenangkan perang dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ini menunjukkan bahwa secara historis, komoditas padi tidak semata-mata hanya komoditas ekonomi; melainkan juga telah dianggap sebagai "komoditas sosial politik" yang bernilai strategis.

Pemberian otonomi pada pemerintah tingkat II harus dipandang sebagai keputusan dan modal politik yang sangat berharga untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat pedesaan terhadap keberadaan pemerintah. Jika keleluasaan otonomi tadi dimanfaatkan secara salah oleh para elit politik dan aparat pemerintah tingkat II, maka peluang mengembalikan kedaulatan masyarakat pedesaan untuk membangun perekonomian nasional akan semakin tertutup.

## AGRIBISNIS PADI DAN BUDAYA EKONOMI PEDESAAN

Pada kebanyakan masyarakat pedesaan beragroekosistem persawahan, agribisnis padi bisa dipandang sebagai budaya inti ekonomi masyarakatnya. Pada sebuah wawancara dengan petani di Lampung Tengah (akhir 1980-an), petani pada Kelompok Subak Keloda di Kabupaten Tabanan (2002), dan petani di kawasan irigasi Riam Kanan (Kabupaten Banjar Baru, Kalimantan Selatan, 2000) penulis memperoleh kesan bahwa padi bukan semata-mata komoditas ekonomi masyarakat pedesaan, melainkan telah menjadi inti organisasi kehidupan masyarakat pedesaan itu sendiri. Geertz (1983) menjelaskan bahwa inti budaya organisasi masyarakat pedesaan Jawa (Indonesia dalam) adalah padi sawah; sedangkan budaya (misalnya) tanaman tebu adalah sisi luar dari organisasi ekonomi yang dikendalikan oleh perekonomian asing ("kota"). Dengan mengandalkan ekonomi berbasis padi, masyarakat secara kolektif bukan saja merasa aman terhadap ancaman krisis subsistensi, namun juga bisa untuk membangun jaringan organisasi ekonomi pedesaan yang kuat. Selain itu, berdasar kasus lembaga Banjar di Bali (Yasa, 1997), kemantapan keorganisasian ekonomi padi sawah ini juga bisa dijadikan landasan untuk membangun sistem pemerintahan yang sangat otonom di tingkat desa.

Secara sosiologis, format pemikiran bahwa masyarakat persawahan di Jawa dan Bali tidak akan meninggalkan budaya menanam padi sudah sejak lama dijadikan dasar untuk membangun sistem perokonomian skala besar setingkat negara. Penerapan sistem ekonomi dualistik, sebagaimana dikemukakan Boeke (1982) dan Geertz (1983), menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda membangun kekuatan organisasi ekonominya berdasarkan kekuatan kelembagaan masyarakat padi di pedesaan. Kuatnya sistem organisasi ekonomi masyarakat padi di pedesaan ini oleh "orang asing" dimanfaatkan sebagai modal dasar untuk membangun ekonomi "kapitalis" lintas etnis dan berskala (semi) global.

Terbentuknya sistem ekonomi berpola dualistik seyogyanya tidak dipandang sebagai proses alamiah evolusi budaya ekonomi pedesaan. Penulis sangat curiga, bahwa hal itu adalah bagian dari rekayasa politik ekonomi pemerintah Hindia Belanda untuk memanfaatkan budaya ekonomi pedesaan dan sekaligus mengisolasi dari peradaban ekonomi pasar. Dengan cara demikian, pada waktu senggang, kelembagaan tenaga kerja di pedesaan dapat digerakkan menjadi faktor produksi bernilai ekonomi tinggi namun dengan bayaran ("upah") relatif rendah, sehingga ekonomi komersial berdasar komoditas tebu (gula), kopi atau komoditas perkebunan lain dapat dikembangkan dengan baik. Dengan cara demikian pemerintah Hindia Belanda dapat memanfaatkan sumberdaya masyarakat persawahan tradisional di Jawa dan Bali yang bernilai ekonomi tinggi untuk menjangkau pasar Eropa dan ekonomi pasar uang global.

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, sedikit banyak pola ekonomi dualistik ini juga dijadikan dasar oleh para perancang kebijakan ekonomi di Jakarta untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi. Dalam strategi

kebijakannya, pengembangan budaya ekonomi masyarakat padi di pedesaan tidak dijadikan sasaran utama penguatan perekonomian nasional, melainkan hanya sebagai sasaran antara. Sasaran utama kebijakan ekonomi tadi adalah penyediaan bahan pangan murah yang bisa dijangkau oleh daya beli buruh industri di perkotaan (Rahardjo, 1990). Dengan sasaran tadi proses transformasi perekonomian nasional dari "agrarian stage" ke "industrial stage" diharapkan dapat dicapai secara cepat. Pada Restorasi Meiji akhir abad 19 di Jepang (Moore, 1972), untuk mempercepat transformasi ke arah industrialisasi di Jepang, pola semacam ini juga digunakan. Hanya saja, pengembangan perekonomian padi di Jepang disertai dengan reformasi agraria dan penarikan pajak yang tinggi. Tujuannya adalah agar dari kelembagaan ekonomi beras di pedesaan dapat diperoleh kapital segar untuk menggerakkan industri di perkotaan, dan sekaligus menyediakan bahan pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat perkotaannya.

Dari uraian di atas bisa dipahami jika dikatakan bahwa prestasi pemerintah dalam mengembangkan budaya padi masyarakat pedesaan tidak sepenuhnya didasarkan pada pengembangan kekuatan kelembagaan ekonominya. Tercapainya swasembada pangan nasional 1984 terutama disebabkan oleh kuatnya kebijakan ekonomi politik dan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dan represif untuk memaksa masyarakat pedesaan beserta perangkat pemerintahan tingkat desa, yang seringkali juga dibantu dengan aparat militer, untuk memfokuskan pada program peningkatan produksi padi secara fisik. Kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat banyak di pedesaan, terutama petani berlahan sempit dan buruh tani, kurang mendapat perhatian yang memadai.

Pada saat yang bersamaan, selama periode penggalakan revolusi hijau berbasis varietas padi unggul dari luar (terutama dari IRRI) yang haus input modal dan bahan anorganik, terjadi gejala polarisasi penguasaan lahan yang cukup intensif. Peningkatan produksi padi secara nasional pada saat itu (1965-1980-an) memang meningkat pesat. Namun, pada saat hampir bersamaan, proses marginalisasi dan penghancuran kelembagaan perekonomian masyarakat pedesaan berlangsung dengan pesat pula. Tingkat ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap bantuan dan "bimbingan" (melalui paksaan halus) jaringan aparat pemerintah dari tingkat pusat hingga desa juga menjadi semakin tinggi. Ini sebagai konsekuensi logis dari diterapkannya UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Widjaja, 1996). Taryoto et al. (1993) menyebutkan bahwa setiap ada program peningkatan produksi padi, karena adanya pemberian kredit (BIMAS), pada tahun berikutnya selalu diikuti tunggakan kredit yang relatif besar.

Sajogyo (1974) juga menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam pengembangan perekonomian padi yang didasarkan pada penerapan bibit unggul (haus input uang berupa penggunaan pupuk anorganik, obat-obatan kimiawi, air dan tenaga kerja) hanya terbatas pada lapisan elit desa atau pemilik lahan luas. Golongan inilah yang secara akumulatif lebih banyak menikmati serangkaian kebijakan intensifikasi padi sawah yang didukung pemberian bantuan kredit berbunga

rendah. Dengan struktur penguasaan lahan yang timpang, perekonomian desa dikuasai oleh elit penguasa tanah dan pemilik uang dari kota. Dari data yang dikemukakan oleh Husken dan White (1989) dan Sensus Pertanian (1993) dapat diketahui bahwa selama hampir seabad struktur penguasaan tanah di Jawa tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti. Dengan kata lain, struktur masyarakat padi sawah, khususnya di Jawa, relatif tidak berubah. (Perlu diketahui bahwa data penguasaan tanah sawah di luar Jawa masih sangat lemah, sehingga sulit dijelaskan apakah pada masyarakat di luar Jawa juga mengalami hal yang mirip dengan di Jawa).

## ORGANISASI EKONOMI PEDESAAN

Dari "Vandemecum Bimas Volume III" (Anonimous, 1977) diperoleh gambaran bahwa pada awal kemerdekaan antara rendahnya produksi pertanian (padi) dan belum majunya perekonomian pedesaan masih menunjukkan gejala berimpit. Organisasi seperti Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD), yang didirikan tahun 1947, bukan saja berfungsi sebagai lembaga penyuluhan petani, namun juga sebagai lembaga dan tempat pertemuan dan musyawarah untuk petani (Taryoto et al., 1993). Organisasi ekonomi seperti koperasi petani baru diperkenalkan tahun 1964/1965, yang dikenal sebagai Koperasi Pertanian (Koperta). Baru pada awal 1970-an, diperkenalkan melalui program BIMAS, dibentuk (oleh pemerintah) organisasi perekonomian desa yang dikenal dengan Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Lembaga Koperasi Unit Desa atau KUD, yang dibentuk sejak 1974, adalah juga organisasi bentukan pemerintah yang tujuan utamanya adalah membantu melancarkan pelaksanaan program Bimas padi sawah di pedesaan.

Dalam perjalanannya, setelah bantuan kredit Bimas dan Kredit Usahatani (KUT) tidak diintensifkan lagi, organisasi KUD mulai menunjukkan ketidakberdayaannya untuk menopang perekonomian pedesaan. BRI Unit Desa, yang keberadaannya banyak digerakkan oleh kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung program pencairan kredit Bimas, juga mengalami nasib seperti KUD. Organisasi ekonomi yang kemudian muncul dan berkembang di pedesaan umumnya adalah penjual saprodi, pedagang pembeli gabah petani dan pengolah hasil pertanian seperti usaha Rice Milling Unit (RMU). Organisasi tadi umumnya dikendalikan secara perorangan, dan hanya sedikit yang dikelola secara kolektif atau mengikuti pola koperasi. Cara kerja mereka umumnya didasarkan pada dua ciri, yang pertama, mengikuti pola hubungan jual beli biasa. Kedua, mengikuti pola hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan kepercayaan personal antara "Sang Patron" dan "Klien"-nya. Sang patron umumnya adalah para penguasa tanah atau pemilik kapital di pedesaan, sedangkan klien adalah petani kecil (berlahan sempit) dan petani tak bertanah.

"Kejayaan" KUD berakhir, karena melemahnya dukungan pemerintah di satu sisi dan tidak mengakarnya lembaga ini pada kepentingan masyarakat pedesaan di sisi lain. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa pada hampir semua masyarakat

pedesaan mengalami “kekosongan kelembagaan”, khususnya di bidang ekonomi. Kebanyakan perekonomian pedesaan dikendalikan oleh pelaku-pelaku ekonomi berkapital besar di perkotaan atau agen dari pemilik kapital besar tadi. Oleh sebab itu, terutama pada daerah yang kekuatan kelembagaan ekonomi setempatnya relatif lemah, secara keseluruhan posisi tukar masyarakat petani padi dalam peredaran perekonomian terbuka relatif lemah. Gejala yang mudah ditangkap dari gambaran ini adalah bahwa peran pemerintah yang selama ini menggunakan “pendekatan politik kekuasaan” dalam menggerakkan perekonomian pedesaan bisa dikatakan mengalami kegagalan. Proses transformasi kelembagaan perekonomian pedesaan bukan hanya mengalami gejala stagnasi, melainkan juga kemunduran yang serius.

Organisasi ekonomi pedesaan harus dipandang sebagai bagian dari sistem masyarakat pedesaan yang perlu mendapat perhatian serius, karena hingga kini aspek organisasi ekonomi ini masih menjadi titik lemah dalam memasuki era pasar bebas. Menurut Uphoff (1992), suatu lembaga atau organisasi lokal yang dinilai bisa mendorong kemajuan masyarakat haruslah mampu menjaring partisipasi masyarakat secara masif (Inayatullah, 1979). Ciri organisasi sosial (dan ekonomi) yang berciri monolitik (Tjondronegoro, 1977) dan feodalistik sangat kurang sesuai untuk mengantarkan perekonomian pedesaan bisa cepat maju bersamaan dengan dengan pencapaian tujuan keadilannya. Selama ini keorganisasian atau kelembagaan ekonomi pedesaan, seperti KUD (yang dibentuk pemerintah), secara akademik juga perlu dicurigai dalam mendorong terjadinya polarisasi sosial ekonomi yang tajam di pedesaan (Hayami dan Kikuchi, 1987).

Organisasi ekonomi yang dibangun untuk masa depan masyarakat Indonesia yang masih sarat dengan ciri agraris haruslah berorientasi pada penguatan ekonomi pedesaan. Salah satu tujuan utamanya adalah mendorong dihasilkannya produk-produk pertanian dan jasa usaha lainnya yang memiliki daya saing tinggi di pasaran. Organisasi semacam ini sudah barang tentu harus bertolak dari kekuatan masyarakat pedesaan itu sendiri. Dengan organisasi tadi masyarakat pedesaan diharapkan bisa menguasai aset-aset ekonomi strategisnya, baik yang berupa sumberdaya material maupun sumberdaya nonmaterialnya. Sebagaimana dikemukakan Sudaryanto dan Pranadji (2000), organisasi ekonomi pedesaan tadi adalah seperti bangunan jaringan kemitraan agribisnis yang seharusnya dikembangkan di pedesaan. Beberapa ciri penting organisasi ekonomi pedesaan yang dinilai mampu untuk meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan adalah sebagai berikut:

- (1) Strategi reformasi organisasi ekonomi di pedesaan sejauh mungkin diarahkan untuk tujuan menghasilkan produk akhir (misalnya beras kepala), bukan sekedar untuk (misalnya) bahan baku yang harus diolah lagi (misalnya; gabah kering giling) atau sebagai input industri. Organisasi ekonomi desa yang dibangun pemerintah pusat pada masa lalu lebih banyak dipusatkan untuk pengembangan usaha pertanian sebatas pada kegiatan usahatani. Oleh sebab itu, pelaku ekonomi di pedesaan hingga kini belum sepenuhnya bisa menikmati semua hasil nilai tambah produk

pertanian padi sawah yang dihasilkan. Sistem agribisnis padi yang ada masih tidak efisien dan tidak mampu bersaing dengan sistem agribisnis padi negara lain, misalnya Vietnam.

- (2) Konsolidasi fisik cabang-cabang kegiatan agribisnis padi sawah masih sangat lemah. Hal ini bukan saja merupakan titik lemah daya saing agribisnis padi sawah Indonesia, namun juga menjadi sumber pemborosan pemanfaatan sumberdaya pertanian dan ekonomi pedesaan. Konsolidasi cabang agribisnis tadi seyogyanya menjadi perhatian dan memperoleh penanganan secara serius oleh banyak pihak, terutama kalangan aparat pemerintah. Upaya mengkonsolidasi seluruh cabang kegiatan dan sumberdaya agribisnis padi sawah di pedesaan merupakan hal yang mendesak, karena melalui cara ini terbuka kemungkinan terjadinya penguatan jaringan dan sistem agribisnis padi sawah di pedesaan.
- (3) Dipandang dari keorganisasian ekonomi, jaringan agribisnis padi yang dibangun di pedesaan seyogyanya diarahkan untuk memperkuat makna pengintegrasian kegiatan agribisnis, yang selama ini masih sangat tersekat-sekat, menjadi bangunan ekonomi yang relatif utuh. Tujuan pengintegrasian ini adalah untuk memperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu mewujudkan asas skala ekonomi yang kompetitif (MES=Minimum Economics of Scale) di satu sisi dan untuk menarik seluruh potensi nilai tambah dari keseluruhan jaringan agribisnis padi pada pelaku ekonomi di pedesaan di sisi lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makna peningkatan efisiensi pada jaringan agribisnis padi sawah tadi sekaligus dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan.
- (4) Sistem pengintegrasian tadi harus mencakup pula pengembangan kepemilikan jaringan agribisnis secara kolektif. Dengan model penguasaan saham secara kolektif, mengutamakan masyarakat pelaku agribisnis padi di pedesaan sebagai pemilik saham terbesarnya harus mendapat penonjolan. Dalam konsep ini penguasaan secara individual ("monopoli") terhadap jaringan atau salah satu cabang agribisnis padi tidak dimungkinkan lagi, sehingga tidak ada konsentrasi penguasaan (modal) agribisnis padi pada segelintir pemilik modal. Dengan cara demikian, sebagian besar jaringan agribisnis padi bisa dikuasai masyarakat pedesaan dan interdependensi antar pelaku agribisnis padi diharapkan bisa menjadi relatif seimbang. Dengan kata lain, kecenderungan terjadinya interdependensi antarpelaku agribisnis di pedesaan yang sangat asimetris, seperti yang umum terjadi selama ini, bisa dihindarkan.
- (5) Dalam rangka memberi insentif bagi pelaku ekonomi padi sawah untuk menginvestasikan uang atau aset berharga yang dimilikinya, pengakuan terhadap kepemilikan individu pada agribisnis di pedesaan masih dimungkinkan. Hanya saja kepemilikan individu tadi seyogyanya diterjemahkan dalam bentuk kepemilikan saham, bukan pada (misalnya) kepemilikan secara monopolistik atas suatu cabang kegiatan agribisnis tertentu. Sebagai contoh, dengan memonopoli jaringan pemasaran, maka hampir seluruh nilai tambah agribisnis padi sawah di pedesaan bisa dikuasainya,

dan hanya sebagian kecil yang jatuh di tangan petani di pedesaan. Secara keorganisasian bisnis, pemilikan individu harus sebatas kontribusi modal. Sedangkan dari segi pengambilan keputusan (manajemen) kegiatan usaha tetap harus dilakukan mengikuti kaidah-kaidah manajemen futuristik, seperti yang akan dijelaskan kemudian.

Beberapa syarat penting yang harus diperhatikan dalam menghela reformasi keorganisasian ekonomi pedesaan berbasis pengembangan jaringan kegiatan agribisnis padi adalah: Pertama, perlu adanya kekuatan lembaga penunjang yang setiap saat siap melayani keperluan kegiatan agribisnis. Lembaga yang dimaksud mencakup tersedianya sistem keuangan dan perkreditan mikro, pelayanan informasi pemasaran hasil dan kebutuhan inovasi untuk pengembangan daya saing produk agribisnis padi setempat. Kedua, prasarana ekonomi dan jaringan telekomunikasi yang memadai di pedesaan, sehingga dinamika dan perkembangan kegiatan agribisnis padi di pedesaan bisa seirama dengan tuntutan kebutuhan pasar. Ketiga, adanya peraturan pemerintah, yang merupakan representasi kepentingan masyarakat banyak, yang diarahkan untuk membatasi praktek monopoli pada kegiatan agribisnis yang sedang dibangun sebagai basis kegiatan perekonomian pedesaan. Keempat, adanya sistem penegakan hukum yang jelas dan tegas, sehingga berbagai macam konflik yang terjadi antar pelaku ekonomi di pedesaan bisa diselesaikan dengan adil.

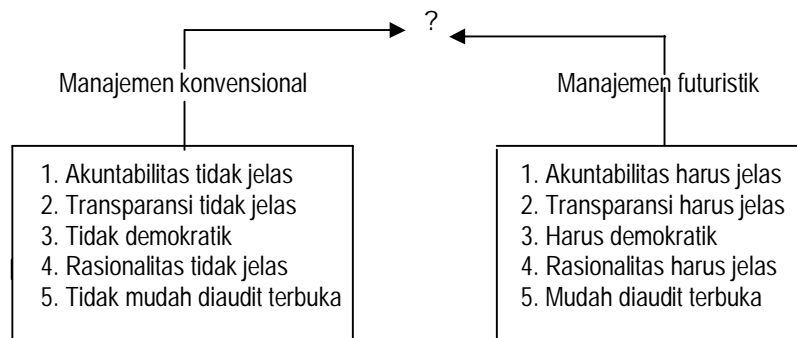
Organisasi (dan manajemen) merupakan bagian dari konsep kelembagaan yang mengarah pada pekerjaan yang dilakukan secara kolektif. Ini dilakukan dengan pengertian bahwa jika seseorang bekerja secara individual maka hasilnya akan kalah efisien dan efektif dibanding jika individu-individu tadi menjalin hubungan kerja sama dengan kesepakatan dan cara tertentu. Seperti dalam sebuah tim sepak bola, kemampuan individu mengolah dan memainkan bola merupakan syarat penting seseorang bisa direkrut menjadi anggota tim sepak bola. Namun tidak benar jika semua pemain hanya pandai memainkan bola (misalnya) di garis belakang saja, dan tidak satu pun yang diandalkan sebagai pencetak gol di gawang lawan. Satu tim sepakbola perlu didukung para pemain yang masing-masing mempunyai keahlian memainkan bola pada posisi atau peran yang spesifik. Hal yang tidak kalah penting adalah memadukan secara harmonis semua pemain sehingga tercipta pola organisasi permainan yang indah dan produktif dalam menghasilkan gol. Demikian juga halnya kerja suatu tim dalam organisasi atau lembaga ekonomi di pedesaan. Setiap pelaku ekonomi yang terorganisasikan harus mempunyai peran yang jelas, karena dengan demikian akan bisa dicapai efisiensi dan keefektifan kerja yang relatif tinggi.

## SISTEM MANAJEMEN EKONOMI

Penyelenggaraan keorganisasian ekonomi pedesaan memerlukan dukungan kelembagaan atau sistem manajemen yang memberikan cukup garansi untuk

dikembangkannya sistem agribisnis padi yang sehat dan berdaya saing tinggi di pedesaan. Sistem manajemen yang dimaksud fokusnya ditekankan pada bagaimana pengambilan keputusan bersama (kolektif) dapat dilakukan secara baik. Perlu ditekan-kan bahwa sistem manajemen yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan pember-dayaan “modal sosial” setempat dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat pedesaan, (bukan penerapan sistem manajemen “militer” untuk mengatasi situasi keadaan gawat atau perang).

Sejalan dengan reformasi untuk memperkuat kelembagaan perekonomian desa, sistem pengambilan keputusan (misalnya) pada kegiatan keorganisasian agribisnis padi sawah di pedesaan seyogyanya memperhatikan kaidah-kaidah tertentu yang bersifat universal. Berdasarkan hal itu, keputusan yang dihasilkan bukan saja mempunyai kekuatan untuk meningkatkan daya saing kegiatan agribisnis padi yang ada, namun yang juga lebih penting adalah meningkatkan keseluruhan daya saing ekonomi pedesaan. Sistem manajemen untuk penguatan kelembagaan ekonomi desa tadi kita sebut saja manajemen futuristik, yang secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbedaan Sistem Manajemen pada Keorganisasian Perekonomian Pedesaan Lama (Konvensional) dan Baru (Futuristik) dan Ketidakjelasan (?) Arah Perkembangannya

Perkembangan sistem manajemen dalam keorganisasian ekonomi pedesaan selama ini menunjukkan arah yang kurang jelas, ke arah maju atau mundur?. Gambar 1 menunjukkan perbedaan antara sistem manajemen konvensional (“lama dan terbelakang”) dan sistem manajemen futuristik (“baru dan maju”) dalam pengelolaan keorganisasian perekonomian pedesaan. Tampak jelas bahwa untuk penguatan keorganisasian perekonomian pedesaan dibutuhkan sistem manajemen baru dan maju, yang dengan itu keorganisasian tadi akan memiliki daya antisipasi dan daya saing yang relatif tinggi. Pada butir satu hingga butir empat mencerminkan bagaimana pengambilan keputusan pada kegiatan ekonomi dalam suatu organisasi ekonomi pedesaan sudah harus mengadopsi ciri-ciri futuristik (Anonymous, 2001).

Dalam rangka memposisikan masyarakat pedesaan untuk melaju pada rel kemajuan ekonomi, masyarakat pedesaan tadi harus dipandang sebagai entitas ekonomi yang mandiri. Selama ini istilah masyarakat pedesaan sering dipinjam sebagai komoditas pembangunan dan dijadikan "obyek bisnis (politik)" di kalangan elit atau birokrat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai obyek bisnis politik, sistem akuntabilitas yang ditujukan untuk kemajuan ekonomi masyarakat pedesaan menjadi kabur. Dalam hal ini, masyarakat pedesaan seakan-akan tidak boleh mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban para elit politik, birokrat pemerintah dan LSM terhadap apa yang dilakukan dengan mengatasnamakan dirinya. Untuk lebih menjamin kemajuan perekonomian masyarakat pedesaan, sistem akuntabilitas terhadap setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak di pedesaan haruslah jelas.

Berkaitan dengan ketidakjelasan akuntabilitas tadi, biasanya akan diikuti juga dengan kurang adanya transparansi dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan para elit politik, pemerintah mau pun LSM terhadap kepentingan masyarakat pedesaan. Prinsip kejelasan transparansi ini juga sejalan dengan upaya membangun sistem masyarakat madani ("civil society") yang lebih demokratis, tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik ("good governance and clean government"). Khasanah budaya masyarakat kecil di pedesaan umumnya mempunyai potensi dikembangkannya prinsip transparansi yang dimaksud, dan hal itu secara jelas dapat ditunjukkan oleh masyarakat pedesaan Bali (Mantra, 1990). Jika hal ini berhasil ditegakkan pada seluruh jaringan masyarakat komunal di pedesaan, maka dalam waktu tertentu indikasinya harus dapat dtampilkan oleh adanya peningkatan daya saing perekonomian pedesaan secara signifikan.

Jika prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan diniatkan untuk ditegakkan secara konsekuen, maka demokratisasi dalam setiap pengambilan keputusan pun akan relatif mudah dikembangkan. Salah satu syarat dari akuntabilitas dan transparansi yang dimaksud adalah menghargai kepentingan masyarakat banyak di pedesaan. Melalui cara demikian upaya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama atau subyek pembangunan perekonomian pedesaan akan menjadi lebih mudah diwujudkan. Dengan kata lain, demokratisasi terhadap setiap pengambilan keputusan di pedesaan harus menjadi bagian penting dari penerapan sistem manajemen futuristik, terutama dalam rangka peningkatan daya saing perekonomian pedesaan di arena pasar bebas.

Istilah membangun dan melakukan pengawasan pembangunan dari bawah sudah lama didengungkan, namun hal itu umumnya masih terbatas sebagai slogan politik. Sistem pengawasan dari bawah yang rasional dan berdasarkan alasan yang masuk akal pada keorganisasian perekonomian pedesaan pada masa lalu dalam kenyataan masih menjadi barang langka. Sebagai gambaran, hampir semua manajemen KUD dan pemerintahan desa selama lebih dari 30 tahun tidak mendasarkan pada prinsip ini. Oleh karena itu bisa dimengerti jika manfaat dari penyelenggaraan KUD

dan pemerintahan desa dalam kenyataan sedikit sekali yang bisa dirasakan golongan masyarakat bawah di pedesaan. Melalui penegakan asas rasionalitas dalam proses pengauditan terhadap setiap pengambilan keputusan, maka pengelolaan keorganisasian perkonomian pedesaan diperkirakan akan lebih mudah disesuaikan dengan dinamika dan tantangan kemajuan.

## TATA NILAI DAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

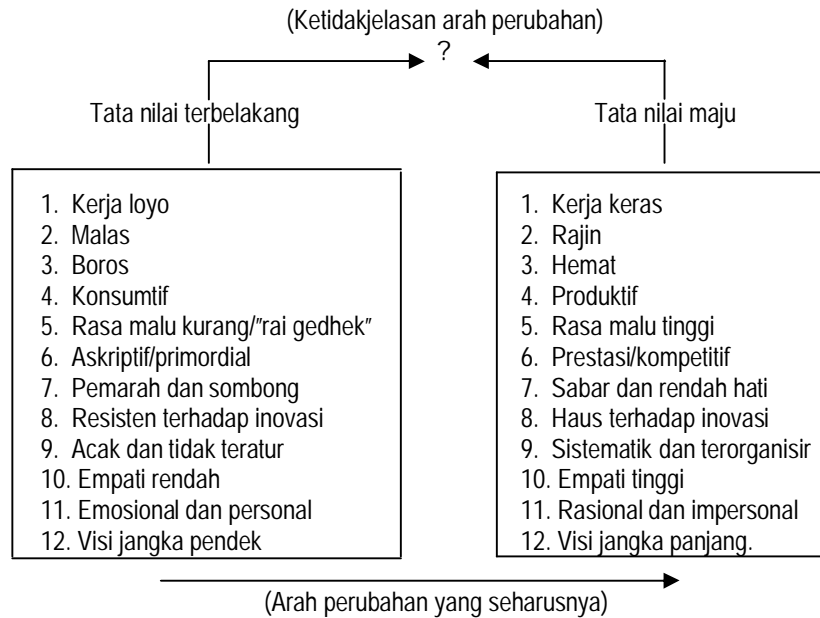
### Tata Nilai Kemajuan

Bukti empiris kesejarahan menunjukkan bahwa perkembangan dan kemajuan ekonomi suatu negara atau masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kekayaan atau besarnya sumberdaya alam yang dipunyai, melainkan juga tergantung pada penguasaan aspek kelebagaannya. Bahkan di banyak kasus, aspek kelembagaan, atau menurut Sorokin (1964) sumberdaya nonmaterial, inilah yang lebih menentukan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Sebagai contoh, Jepang dan Singapura adalah dua negara yang mempunyai kekayaan sumberdaya alam relatif sedikit, namun dari segi kecepatan perkembangan ekonomi masyarakatnya sulit ditandingi oleh hampir semua masyarakat negara di dunia ini. Salah satu aspek kelembagaan yang dimaksud adalah dianut atau tidaknya tata nilai yang mengindikasikan kemajuan yang meluas di masyarakat.

Pengertian reformasi kelembagaan ekonomi pedesaan harus mempunyai makna peningkatan daya saing ekonomi masyarakatnya. Makna kelembagaan memuat aspek "isi", seperti yang dikemukakan oleh Lauer (1982), tidak hanya pada "bentuk luar" atau fisiknya. Salah satu isi penting dari kelembagaan adalah tata nilai yang menghidupkan fungsi kelembagaan ekonomi. Dalam makalah ini penulis membuat dikotomi tata nilai yang polaristik, yaitu antara tata nilai yang mencerminkan gaya hidup ke arah kemajuan atau futuristik di satu sisi dan tata nilai terbelakang di sisi lain (Gambar 2). Jika kelembagaan ekonomi desa terisi oleh tata nilai terbelakang, maka hampir dapat dipastikan daya saing agribisnis padi dan ekonomi masyarakat desa akan relatif rendah. Dalam keadaan seperti itu mereka juga akan sulit membangkitkan energi sosialnya untuk kemajuan kegiatan ekonominya secara berkelanjutan.

Reformasi kelembagaan dalam bentuk penonjolan tata nilai kemajuan bukan saja akan mendorong kelembagaan agribisnis dan ekonomi padi di pedesaan lebih cepat maju, namun juga akan meningkatkan daya saing masyarakat desa itu sendiri di bidang ekonomi. Tata nilai yang populer memajukan masyarakat Jepang adalah dipakainya prinsip rasa malu pada hampir semua elemen kehidupan masyarakatnya. Weber (1964) menyatakan bahwa salah satu komponen dari tata nilai kemajuan adalah apa yang disebut dengan "calling " atau panggilan (hati). Pada masyarakat Barat tata nilai tadi dikenal juga sebagai "Protestant Ethics", dan hal itu pula yang diklaim sebagai faktor penjelas mengapa masyarakat di dunia Barat lebih maju dibanding dengan

masyarakat dari belahan bumi lainnya. Dalam istilah lain Hagen (1962) menyatakan bahwa faktor personalitas menjadi penentu kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Lebih-lebih lagi jika penerapan aspek personalitas tadi tidak memperoleh tentangan serius dari kebanyakan anggota masyarakat.



Gambar 2. Perbedaan antara Tata Nilai yang Mencerminkan Masyarakat yang Siap Maju dan Tetap Terbelakang, serta Ketidakjelasan ke Arah Mana Perubahan Tata Nilai Berproses

Dari Gambar 2 tampak bahwa maju atau terbelakangnya masyarakat tidak ditentukan semata-mata oleh penguasaan budaya material saat ini. Seorang remaja atau anak muda yang ke sana ke mari berkendara sedan baru model mutakhir, menenteng handphone (HP) keluaran terbaru dan berpenampilan tampak serba "hebat" belum tentu ia mewakili generasinya yang berciri lebih maju dibanding seorang anak guru atau petani yang ke sana ke mari harus naik kendaraan umum, berpenampilan sederhana, dan setiap hari ke luar masuk perpustakaan mencari pengetahuan pertanian baru untuk ditekuninya. Banyak contoh menunjukkan bahwa pelopor kemajuan di bidang kemajuan ilmu, teknologi dan ekonomi sekali pun bukan stereotip pemuda yang disebut pertama; namun justru yang sering dikenal sejarah adalah yang disebut terakhir. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa penguatan kelembagaan untuk memajukan ekonomi masyarakat (misalnya) pedesaan ditentukan oleh tata nilai apa (maju atau terbelakang?) yang dikandung dan diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat pertanian setempat.

## Kualitas SDM

Keterbelakangan atau adanya krisis ekonomi pada suatu masyarakat umumnya disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada pada masyarakat bersangkutan. Jika kompetensi atau kualitas SDM dalam masyarakat pedesaan rendah, maka hampir dipastikan tingkat kemajuan perekonomian masyarakat tadi akan rendah pula. Lebih dari itu aspek kemajuan kehidupan lainnya juga akan rendah. Secara keseluruhan daya saing atau daya penyesuaian diri masyarakat tersebut terhadap perubahan relatif kurang mantap dan seringkali kalah cepat dibanding dengan kecepatan perubahan itu sendiri.

Aspek kualitas SDM yang dimaksud terdiri atas beberapa faktor yang harus dicermati, yaitu:

- (1) Keterampilan individu atau individual skill yang bisa diandalkan untuk menopang produktivitas kerja atau daya saing dirinya di bidang pekerjaan yang ditekuninya. Sebagai contoh, seorang pemuda desa lulusan SLTA kejuruan yang memiliki keterampilan dalam mengemudikan dan mengoperasikan traktor pengolah tanah dalam masyarakat pertanian beririgasi di daerah Pantai Utara Jawa (Pantura) bisa dinilai memiliki keterampilan yang bisa diandalkan. Dengan keterampilannya tadi, ia akan lebih dibutuhkan para petani pemilik sawah setempat dari pada (misalnya) pemuda biasa yang hanya bisa mencangkul. Secara fungsional keberadaan tenaga operator traktor pengolah tanah sawah tadi sangat dibutuhkan petani agar ia tidak ketinggalan musim atau waktu tanam padi.
- (2) Kematangan emosional (emotional intelligence) yang tinggi akan sangat membantu seseorang mengoptimalkan kemampuannya, dalam arti bisa melayani kepentingan orang lain dengan cara yang bisa diterima oleh cara berpikir dan perasaan orang yang dilayani. Orang yang memiliki kematangan emosional biasanya juga akan mudah menggalang kerjasama dengan orang lain dan begitu pula orang lain terhadapnya. Kematangan emosional ini bisa disebut juga sebagai modal personal yang mengandung potensi untuk peningkatan daya saing individu.
- (3) Kemampuan bekeja secara tim yang relatif baik akan memberikan rangsangan pada orang lain untuk lebih sering mengajak dirinya bekerja sama secara terorganisasi. Tidak ada suatu bidang pekerjaan yang tidak terkait atau tidak tergantung dengan pekerjaan lain. Orang yang bisa enak diajak bekerja secara tim akan lebih disenangi dari pada orang yang biasa bekerja secara sendirian dan bersifat egois. Secara kelembagaan orang yang memiliki kemampuan bekerja secara tim diharapkan lebih bisa meningkatkan efisiensi kerja secara kolektif, dan orang seperti itu relatif sangat dibutuhkan untuk memajukan kegiatan ekonomi secara kolektif.
- (4) Kemampuan anggota masyarakat menghargai tata nilai maju bisa dianggap sebagai salah satu ciri penting tingginya kualitas SDM. Dengan hanya bisa, misalnya, mengapresiasi tata nilai maju, seseorang (paling kurang) tidak akan

menjadi penghalang atau pengganjal kemajuan (ekonomi masyarakat) itu sendiri. Reformasi kelembagaan ekonomi pedesaan, dengan demikian, sangat membutuhkan dukungan kualitas SDM yang memiliki ciri seperti ini. Akan lebih bagus lagi jika kemampuan menghargai tata nilai maju yang dimaksud telah menjadikan bagian dari gaya hidup (life style) atau kebiasaan kehidupan sehari-hari masyarakat pertanian di pedesaan.

- (5) Memiliki sifat dan pengetahuan tentang pentingnya menjunjung tinggi penerapan manajemen futuristik, dan organisasi kerja yang diarahkan untuk menopang kemajuan masyarakat pedesaan harus dipandang sebagai salah satu kriteria kualitas SDM pertanian yang relatif tinggi. Reformasi kelembagaan ekonomi pedesaan sangat memerlukan dukungan individu SDM yang seperti itu. Ia bisa diharapkan berperan sebagai pelaku ekonomi, kontak tani, tokoh masyarakat lokal, penyuluh atau aparat pemerintah di tingkat pedesaan yang mendorong kemajuan.

Dari uraian di atas bisa ditarik gambaran bahwa dukungan kualitas SDM pertanian di pedesaan untuk meningkatkan daya saing agribisnis padi di pedesaan sangatlah penting. Hanya saja, untuk menghasilkan SDM pertanian yang memiliki kualitas tinggi harus ditempuh melalui program dan kebijaksanaan pengembangan SDM pertanian yang sesuai. Apakah program pengembangan SDM pertanian yang dilaksanakan hingga kini telah mengadopsi ciri-ciri kualitas tadi? Perlu dikemukakan bahwa untuk mengembangkan kualitas SDM seperti tadi tidaklah bisa dilakukan sendiri oleh seorang aparat pemerintah. Dalam kaitan ini, (aparat) pemerintah perlu mengajak lembaga dan para pakar yang memiliki kualitas ke arah itu. Kebiasaan aparat memaksakan diri atau merasa sudah bisa melakukan sendiri hal itu justru bisa bersifat kontra produktif terhadap upaya peningkatan kualitas SDM pertanian dan pedesaan pada masa datang.

## KEPEMIMPINAN DAN OTONOMI DAERAH

### Kepemimpinan

Di pedesaan faktor kepemimpinan dan keberadaan seorang pemimpin mempunyai pengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi masyarakatnya. Seorang pemimpin yang tidak dapat menghela dan membantu mendorong masyarakat pedesaan yang dipimpinnya ke arah yang lebih maju maka ia bisa dikatakan tidak memiliki kepemimpinan yang memadai. Seorang Hitler, dari bangsa Jerman, adalah seorang pemimpin yang memiliki kekuatan menggerakkan masyarakat yang dipimpinnya. Hanya saja, praktek penggunaan kepemimpinannya membahayakan masyarakat lain yang tidak sejalan dengan hubungan ras atau etnis dan cita-citanya. Karena itu, walaupun ia bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang hebat namun dilihat dari keuniversalan kepemimpinan yang melekat pada dirinya, ia tidak sepenuhnya bisa disebut sebagai penggerak kemajuan ekonomi masyarakatnya.

Secara umum masyarakat Indonesia masih mencirikan masyarakat paternalistik, di mana faktor karakter pemimpin akan banyak mempengaruhi dinamika (ekonomi) masyarakat bawah. Ciri paternalistik ini seharusnya dikaitkan langsung dengan penyebutan ciri modern atau tradisional suatu perkembangan masyarakat, sebagaimana sering dikemukakan oleh Weber (1964). Pada masyarakat modern sekalipun ciri paternalistik ini masih banyak dijumpai. Moore (1972) menjelaskan kemajuan masyarakat Jepang yang diawali dengan reformasi kelembagaan agrariannya, yang dikenal dengan Restorasi Meiji pada akhir abad 19, ternyata tidak menunjukkan adanya pemudaran ciri-ciri paternalistiknya. Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa ciri paternalistik masyarakat pedesaan dapat dipandang sebagai potensi kelembagaan masyarakat pedesaan untuk dijadikan energi kemajuan ekonominya.

Dengan menempatkan faktor kepemimpinan sebagai bagian penggerak ekonomi pedesaan, sebagaimana dikatakan Poensioen (1969) "leadership as a prime mover of social change ...", kondisi paternalisme masyarakat pedesaan bisa dipandang sebagai modal sosial yang bisa secara masif digerakkan ke arah kemajuan. Artinya, sistem masyarakat pedesaan bukan seperti ruang hampa tanpa energi. Secara umum masyarakat pedesaan mempunyai energi dan potensi untuk maju. Hanya saja, mereka ini juga butuh seorang pemimpin yang bisa menggerakkan dan mengarahkan energi yang dipunyainya. Anonimous (2001) menyebutkan ada beberapa aspek kepemimpinan yang bisa dijadikan energi kemajuan ekonomi, yaitu:

- (1) Dalam rangka meningkatkan daya saing agribisnis padi sawah pada khususnya dan perekonomian pedesaan pada umumnya, kepemimpinan harus digerakkan oleh seorang pemimpin yang memiliki visi ekonomi ke depan yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat yang dipimpinnya. Ketidakjelasan visi dalam kepemimpinan bukan saja akan mengaburkan ke arah mana masyarakat secara kolektif digerakkan, melainkan juga bisa menjadi sumber disintegrasi kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang dipimpinnya. Dengan visi kepemimpinan yang tidak jelas potensi akan terjadi kerugian ekonomi (economic loss) dan pemborosan sumberdaya di wilayah setempat akan semakin besar. Di tangan seorang pemimpin tanpa visi yang jelas, keinginan menguatkan lembaga ekonomi bisa berubah menjadi kegiatan yang kontra produktif.
- (2) Dalam keadaan ekonomi terpuruk seperti sekarang ini, keberadaan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan menggerakkan dan mengarahkan masyarakat pedesaan ke arah yang lebih maju sangat penting. Kepemimpinan harus bisa berfungsi untuk memberi inspirasi masyarakat untuk lebih bergairah dalam bekerja. Seorang pemimpin yang diterima masyarakat bukan sekedar sebagai tukang memberi tanda tangan untuk melancarkan suatu kegiatan (misalnya) usahatani padi sawah, namun ia juga harus bisa menjadi pengarah masyarakat petani untuk menggerakkan keseluruhan jaringan agribisnis padi sawah setempat ke arah yang lebih kompetitif.

- (3) Kemajuan ekonomi harus digerakkan oleh seorang pemimpin yang memiliki suatu keahlian khusus dan keahlian tadi harus tampak menonjol pada seorang pemimpin. Keahlian tadi juga harus mempunyai relevansi dengan kebutuhan riil dalam rangka memajukan kegiatan ekonomi masyarakat yang dipimpinnya. Keahlian juga bisa dijadikan semacam indikator bahwa seorang pemimpin tadi memang memiliki keistimewaan yang bisa dibanggakan secara individu maupun secara kolektif terhadap masyarakat yang dipimpinnya.
- (4) Diterimanya dan bisa diterapkannya kepemimpinan yang baik harus dipandang sebagai hasil dari investasi sosial jangka panjang. Oleh sebab itu, seorang pemimpin yang diterima dan memiliki legitimasi yang kuat pada masyarakat yang dipimpinnya biasanya diawali dengan kuatnya sifat altruistik (bersedia berkorban lebih awal sebelum orang yang dipimpinnya mengikutinya) yang melekat pada dirinya. Dengan sifat seperti itu, ia akan mudah membangun integritas dan kredibilitasnya di kalangan masyarakat pedesaan; yang pada gilirannya ia akan mendapat pengakuan dan penerimaan dari masyarakat yang dipimpinnya. (Butir 4 ini terkait erat dengan butir 1 dan 2). Alasan ia mau bersikap altruistik bisa berupa kemampuan prediksinya terhadap masa depan masyarakat yang dipimpinnya, namun juga bisa atas dasar bagian dari ekspresi ajaran atau kepercayaan yang dianutnya.
- (5) Solidaritasnya merupakan salah satu kekuatan masyarakat yang memungkinkan dikembangkannya jaringan kerja secara kolektif. Penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan harus didasarkan juga pada penggalangan kekuatan solidaritas masyarakatnya untuk maju secara bersama berdasar prinsip "win-win solution". Oleh sebab itu, kepemimpinan harus digerakkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan sebagai solidarity maker. Kemampuan seorang pemimpin membangun solidaritas ini termasuk juga bagian dari sistem untuk mengatasi konflik internal masyarakat yang dipimpinnya secara elegan dan terhormat. Dapat dikatakan salah satu fungsi kepemimpinan yang universal adalah untuk conflict resolution.
- (6) Kepemimpinan yang kuat harus didasarkan pada penggunaan akal sehat. Dengan menjunjung tinggi asas rasionalitas dalam sistem kerja kolektif, fungsi kepemimpinan adalah untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam merespons tantangan kemajuan secara kolektif. Dalam melakukan reformasi kelembagaan pedesaan, beberapa aspek penting kehidupan kolektif yang penting dikembangkan dalam keorganisasian sosial ekonomi pedesaan adalah penegakan prinsip demokrasi, rasionalitas dalam interaksi sosial dan akal sehat dalam setiap pengambilan keputusan.

#### Otonomi dan Kepercayaan Masyarakat

Otonomi telah lama menjadi wacana publik, namun secara eksplisit masih sebatas pada pernyataan atau slogan (politik). Hubungan antara otonomi dengan

pengelolaan kepercayaan masyarakat atau public trust secara sosiologis masih kurang dibahas mendalam, sehingga makna otonomi itu sendiri terkesan masih menggantung dan kehilangan arti bagi reformasi ekonomi pedesaan.

Sudah dua tahun otonomi pemerintahan telah menjadi rumusan keputusan politik di tingkat lembaga tertinggi negara, yaitu dalam bentuk diberlakukannya tiga Undang-undang (UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN). Hadirnya tiga undang-undang ini memang dalam suasana yang kurang nyaman, di mana tingkat kepercayaan masyarakat pedesaan terhadap penyelenggara pemerintahan dan negara sangat rendah. Dalam prakteknya pelaksanaan tiga undang-undang yang berkaitan dengan otonomi ini baru berjalan setahun, dan hal inipun di berbagai tempat terjadi banyak penyimpangan (Pranadji, 2001; Koswara, 2000; dan Rasyid, 2001).

Diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah secara formal telah memberi angin segar terhadap pengelolaan kepercayaan masyarakat ("public trust") yang diserahkan pada pejabat publik. Penelitian yang dilakukan Pranadji (2001) menunjukkan bahwa operasionalisasi UU No.22 tadi di daerah tingkat II lebih banyak diarahkan untuk penggalangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pada sebagai modal politik yang sangat berharga untuk pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan agar lebih kompetitif. Masalah high cost economy yang terjadi di daerah pedesaan, yang dahulu banyak disebabkan oleh tatanan kelembagaan ekonomi dan prasarana pedesaan yang kurang mendukung, sekarang ini ditambah lagi dengan borosnya sistem birokrasi pemerintah hingga daerah tingkat II.

Diberlakukannya UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dapat dipandang sebagai refleksi kegagalan para pemimpin dan elit di Jakarta, yang mengendalikan pemerintahan dan kegiatan ekonomi selama 30 tahun lebih, dalam mengemban kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat pedesaan pada para elit politik, militer, birokrat pemerintah dan ekonomi; yang cenderung dikelola secara sentralistik dan sewenang-wenang; ternyata menimbulkan gejala inefisiensi pengelolaan sumberdaya publik yang luar biasa. Dengan mekanisme kontrol masyarakat yang relatif lemah, disebabkan penerapan politik stabilisasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, para elit di Jakarta sulit menghadapi godaan untuk memperkaya diri sendiri melalui pengembangan jaringan KKN yang masif, yang pada akhirnya sangat potensial menguras kekayaan negara dan masyarakat secara menakutkan.

Pada akhir masa pemerintahan Orde Baru hingga kini ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kepemimpinan nasional sudah sangat rendah. Sebagai masyarakat yang budaya paternalistiknya tinggi dan menyukai idiom "Ratu Adil", kegagalan pemimpin dalam mengembangkan kepercayaan yang diperoleh (baik secara paksa maupun sukarela) dari masyarakat hal itu tidak akan membuat

masyarakat jera untuk menyerahkan kepercayaannya pada rezim pemimpin atau pemerintahan berikutnya. Impian kolektif masyarakat pedesaan terhadap akan datangnya kehidupan adil dan makmur ("negara kang gemah ripah loh jinawi titi tata tentrem kerta raharja", Chodjim, 2002) masih relatif lebih besar dibanding gelombang kekecewaan yang dari waktu ke waktu harus dirasakan dengan getir dan ditanggungnya. Oleh sebab itu, masih dapat dikatakan bahwa jarang sekali didapati berbagai kekacauan dan konflik sosial terbuka berskala besar ke arah (misalnya) perpecahan sosial dan disintegrasi bersumber dari ketidakpuasan masyarakat pedesaan.

Sumberdaya waktu yang dikuras oleh para elit di Jakarta dalam menyalahgunakan kepercayaan masyarakat pedesaan sangat tidak efisien mencapai lebih dari 30 tahun. Sebagai perbandingan, kurang lebih selama itu pula masyarakat Malaysia berhasil menyulap dirinya dari negara agraris tradisional, yang dahulu dalam banyak aspek masih tertinggal dibanding Indonesia, menjadi negara industri maju yang disegani komunitas negara dunia. Sekitar selama itu pula yang dibutuhkan masyarakat Jepang, sejak Restorasi Meiji (Moore, 1972), menjadi sang penakluk negara sekuat Uni Sovyet pada awal abad 20. Bahkan negara kecil seperti Vietnam, yang dahulu secara fisik dihancurleburkan oleh Amerika Serikat melalui perang (saudara) semenanjung Indocina, bisa tampil sebagai negara agraris yang siap bersaing dalam ekonomi pasar terbuka.

Pengelolaan kepercayaan masyarakat oleh para elit tanpa diikuti dengan pemberian hasil dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan kenyamanan hidup, hal itu dapat dipandang sebagai perampasan kepercayaan dan hak masyarakat secara semena-mena. Krisis ekonomi yang dialami masyarakat pedesaan dan dialami masyarakat Indonesia dewasa ini sedikit banyak bisa dipandang sebagai dampak negatif dari kesewenang-wenangan tadi. Masyarakat pedesaan ikut menanggung keterpurukan ekonomi negara dalam bentuk semakin tidak kompetitifnya sumberdaya pertanian di pedesaan di satu sisi, dan di sisi lain mereka ini sebelumnya juga tidak banyak menikmati kucuran dana pembangunan.

Terbelahnya sistem ekonomi nasional menjadi dua belahan besar, yaitu: ekonomi konglomerat dan ekonomi rakyat, menunjukkan bahwa pengelolaan kepercayaan masyarakat tidak sesuai dengan harapan idealnya. Kesenjangan antara ekonomi elit ("sedikit"), yang menguasai sebagian besar aset ekonomi nasional, dan ekonomi rakyat ("banyak"), yang hanya menguasai sebagian kecil aset ekonomi nasional, dari waktu ke waktu semakin menganga. Hal ini bukan saja sebagai pertanda betapa tingginya biaya ekonomi publik (high cost economy) dan investasi ke arah kehancuran bersama, melainkan juga telah menyebabkan sistem ekonomi kita berisiko tinggi. Berapa pun besarnya dana investasi yang masuk dalam sistem ekonomi kita, baik yang berasal dari pinjaman negara luar maupun dana masyarakat, sulit diharapkan bisa mendatangkan berkah ekonomi yang bisa dinikmati secara berkelanjutan dan berskala luas. Masalahnya bukan terletak pada besarnya dana yang bisa diperoleh, melainkan lebih pada tidak efisien dan rusaknya sistem kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan.

Dalam setahun ini pelaksanaan otonomi tadi banyak ditemui penularan penyakit “kegenitan” para elit di Jakarta pada pejabat dan para elit politik di daerah tingkat II. Pejabat pusat sendiri di satu sisi secara kewenangan formal tidak bisa berbuat banyak mengendalikan pelaksanaan otonomi di daerah tingkat II, dan di sisi lain juga tidak memiliki wibawa dan kompetensi mengarahkan pelaksanaan otonomi sesuai yang diidealkan. Pendek kata, pelaksanaan otonomi yang cenderung kebablasan tadi telah menimbulkan masalah baru dalam bentuk peningkatan inefisiensi penyelenggaraan dan pengembangan sistem ekonomi pedesaan.

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini ibarat pisau bermata dua. Pada mata pisau pertama merupakan “modal politik” yang bisa digunakan untuk mengaktifkan sumberdaya masyarakat pedesaan menjadi energi ekonomi yang kuat dan berdaya saing tinggi. Ini bisa terjadi jika modal politik tadi digunakan untuk menggerakkan dan membangun sistem kelembagaan ekonomi di tingkat desa. Jika hal ini yang dilakukan oleh para elit daerah tingkat II, maka jalannya otonomi tadi bisa dikatakan telah berada pada rel yang tepat. Artinya, energi kepercayaan masyarakat yang diterima lewat elit di Jakarta telah dikembalikan pada masyarakat pedesaan dalam bentuk bahwa kepercayaan tadi telah terolah dengan baik.

Pada mata pisau kedua bisa diartikan sebagai lawan dari mata pisau pertama. Pada mata pisau ini terbuka digunakan untuk apa saja menurut kesukaan para elit daerah yang sedang berkuasa. Kepercayaan masyarakat seakan-akan diterima secara gratis oleh para elit daerah tingkat II. Oleh para elit daerah tingkat II istilah *power tends to corrupt* bisa dengan mudah diwujudkan menjadi kenyataan. Dalam kaitan ini, para elit daerah tingkat II berpeluang besar menyalahgunakan kepercayaan masyarakat pedesaan untuk pemenuhan kepentingannya sendiri. Jika ini terjadi dan tanpa kontrol yang memadai, hal ini bisa diartikan masyarakat pedesaan digiring menuju pintu gerbang bencana sosial dan kemanusiaan. Dengan kata lain, hal itu mengarah pada pemupukan menuju krisis multidimensi kedua dan seterusnya ke tingkat yang lebih mematikan.

Pada saat mata pisau kedua tadi diperkirakan siap akan menikam kehidupan perekonomian pedesaan, sebaiknya penajaman dan penegasan makna bahwa otonomi daerah sebagai pelimpahan kepercayaan atau kedaulatan masyarakat pada para elit daerah tingkat II harus lebih disosialisasikan pada masyarakat luas. Jika pelimpahan kepercayaan dalam bingkai keputusan politik formal tidak cukup dipahami dalam pelaksanaan di lapangan oleh para elit daerah tingkat II, maka langkah yang penting ditempuh adalah menurunkan otonomi ke tingkat desa. Dengan kata lain, otonomi harus didekatkan pada pemilikinya, yaitu komunitas di pedesaan. Dengan cara demikian, pemaknaan otonomi tidak mudah dijegal oleh para elit daerah tingkat II dan pada gilirannya makna otonomi yang demikian tadi menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan pada pemilikinya, bukan hanya ke atas.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

- (1) Reformasi kelembagaan untuk penguatan perekonomian padi dan pedesaan harus dilihat dalam bingkai keputusan politik, dan selanjutnya keputusan politik tadi juga harus diterjemahkan secara operasional dalam bentuk perumusan kebijakan pembangunan pedesaan yang sarat dengan azas representasi kepentingan masyarakat pedesaan. Kebijakan otonomi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai bagian dari pengelolaan kepercayaan masyarakat, harus bisa dijalankan hingga tingkat desa. Kelembagaan dan keorganisasian ekonomi pedesaan yang dikembangkan tidak harus sebagai kelanjutan dari (misalnya) kelompok tani hamparan, KUD atau lembaga ekonomi di pedesaan lainnya yang tidak sesuai dengan tuntutan kemajuan ekonomi pedesaan. Penataan penguasaan lahan pertanian untuk mengefektifkan jalannya reformasi kelembagaan ekonomi pedesaan merupakan hal yang penting dilakukan, walaupun hal ini hampir tidak tersentuh oleh program pembangunan pertanian dan pada masa sebelumnya. Melalui reforma agraria yang terancang dengan baik, penguatan perekonomian pedesaan melalui perubahan struktur penguasaan lahan akan lebih menjamin mencapai keberhasilan dibanding hanya (misalnya) dengan adopsi teknologi dan pemberian batuan kredit usahatani.
- (2) Dalam kaitan dengan butir 1, otonomi daerah bisa dipandang sebagai modal politik untuk pengembangan keorganisasian perekonomian pedesaan yang kuat. Reformasi kelembagaan pedesaan harus dipandang sebagai bagian pengembalian dan pengembangan kepercayaan masyarakat pedesaan yang selama ini terampas akibat kesalahan dalam pendekatan pembangunan yang dijalankan oleh para elit politik dan birokrat pemerintah di tingkat pusat. Masih meluasnya gejala yang mengarah pada citra high cost economy dan ekonomi berisiko tinggi dalam pelaksanaan otonomi, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kepercayaan masyarakat pedesaan yang dilakukan oleh para elit politik dan pejabat pemerintah tingkat II tampaknya belum memadai. Penularan penyakit "kegenitan" para elit Jakarta pada para elit daerah tingkat II dalam pelaksanaan otonomi daerah masih tampak jelas, dan hal itu menjadi penghalang besar bagi reformasi kelembagaan perekonomian pedesaan.
- (3) Secara umum dapat dikatakan bahwa penguatan lembaga pedesaan sebagai penggerak ekonomi pedesaan adalah suatu upaya yang tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa; apalagi tanpa konsep yang bisa diandalkan. Mengingat gawatnya akibat yang ditimbulkan oleh kekeliruan perancangan kelembagaan pedesaan pada masa lalu, yang menempatkan perekonomian pedesaan pada posisi yang sangat marjinal, maka pada masa datang perlu dibuat upaya yang tidak kenal lelah agar ekonomi pedesaan bisa bangkit dan menjadi andalan perekonomian nasional. Dapat dikemukakan bahwa jika reformasi

kelembagaan pedesaan tadi dapat menghasilkan perekonomian pedesaan yang kuat dan mandiri, maka upaya reformasi tadi bisa dikatakan mendekati berhasil.

- (4) Reformasi kelembagaan dan keorganisasian ekonomi petani di pedesaan seharusnya bisa dipandang sebagai kegiatan yang terus-menerus tanpa batas waktu hingga terwujud ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya pertanian yang kuat. Upaya ini harus bersifat lintas sektoral, karena tujuannya bersifat multidimensi sekaligus. Sifat multidimensi tadi mencakup antara lain dimensi pertumbuhan ekonomi, dimensi kedirian budaya ekonomi masyarakat pedesaan yang kuat, menghargai terwujudnya keadilan secara lintas spasial, sektor dan sosiobudaya, serta menghormati sumberdaya alam dan agroekosistem padi sawah sebagai aset publik dan pembatas kegiatan ekonomi pedesaan yang kritis.
- (5) Dalam mewujudkan kelembagaan ekonomi pedesaan yang kuat kelompok tani bisa jadi titik mulai untuk membangkitkan penguatan ekonomi pedesaan yang dimaksud. Melalui kelompok tani dilakukan penguatan bidang keorganisasian (dan manajemen) ekonomi ke arah yang berdaya saing tinggi dan siap terjun di arena pasar bebas. Aspek organisasi yang perlu didukung adanya reorientasi pengembangan ekonomi pedesaan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mereformasi keorganisasian ekonomi pedesaan adalah bahwa organisasi ekonomi tadi harus mampu memiliki ciri:
  - (a) Berorientasi menghasilkan produk pertanian padi sawah dan kegiatan ekonomi pedesaan lainnya yang bernilai tambah tinggi.
  - (b) Bisa menguasai keseluruhan jaringan agribisnis yang dibangkitkan melalui sumberdaya yang ada di pedesaan melalui pemilikan (saham) secara kolektif.
  - (c) Alternatif untuk mencapai itu adalah perlu dibangunnya jaringan organisasi kemitraan agribisnis (padi sawah) yang memiliki ciri hubungan interdependensi antar pelaku agribisnis yang relatif lebih simetris.
  - (d) Kecenderungan adanya pemusatan kekuatan kapital pada sebagian kecil pelaku agribisnis sejauh mungkin dihindarkan, sehingga peluang terjadinya monopoli kegiatan ekonomi pedesaan bisa ditekan serendah mungkin.
  - (e) Aspek manajemen yang harus diperkuat adalah pada diterapkannya asas akuntabilitas, transparansi setiap pengambilan keputusan, demokratis dan masuk akal (rasional). Prinsipnya bahwa setiap keputusan harus merepresentasi kepentingan bersama, dan selanjutnya bisa dilakukan pengecekan ulang ("audit") secara terbuka.
- (6) Untuk mewujudkan organisasi agribisnis padi sawah dan perekonomian desa yang tangguh tadi perlu dikembangkan sistem tata nilai dan kepemimpinan yang mengarah pada kemajuan ekonomi. Kedua aspek tadi diharapkan bisa dijadikan penggerak ekonomi pedesaan ke arah yang memiliki daya saing tinggi di pasar terbuka. Tata nilai yang perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat pedesaan adalah yang mencirikan cinta kerja keras, rajin, pola hidup hemat, kerja

efisien, malu jika berbuat salah atau curang, menghargai prestasi kerja, terbuka terhadap inovasi, berdaya empati tinggi terhadap sesama pelaku agribisnis dan perubahan preferensi pasar, menghargai cara kerja sistematis dan terorganisasi, berpikir rasional dalam bekerja dan menggunakan visi jangka panjang dalam menjalankan roda ekonomi pedesaan. Sedangkan aspek kepemimpinan yang harus dikembangkan antara lain adalah yang bisa menjadi pengarah visi perekonomian pedesaan ke arah yang berdaya saing tinggi, menjadi sumber inspirasi dan berkembangnya kreativitas kerja pelaku ekonomi pedesaan, pencipta solidaritas dan pemecahan konflik secara terhormat, diterapkannya prinsip bekerja secara rasional dan dengan kerjasama yang berorientasi peningkatan produktivitas kerja secara kolektif, serta menghargai faktor keterampilan kerja dan berinovasi dalam sistem kerja kolektif.

- (7) Upaya reformasi kelembagaan ekonomi pedesaan pada masa datang harus sejalan dengan upaya mentransformasikan tatanan pemerintahan dan pengelolaan sumberdaya ekonomi yang lebih otonom hingga tingkat desa. Prinsip otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diwujudkan juga dalam pemberian otonomi pada pelaku-pelaku ekonomi di pedesaan. Sistem penyuluhan yang selama ini dijadikan lembaga penggerak pembangunan pertanian harus diorientasikan pada kemajuan ekonomi, bukan hanya pada (misalnya) peningkatan produksi pertanian (padi sawah) dalam arti yang sangat sempit. Kelompok tani harus dipandang sebagai wahana pengembangan organisasi ekonomi pedesaan, dan bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk memobilisasi masyarakat pedesaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 1977. Vandemecum Bimas Volume III. C.V. Yasaguna. Jakarta.
- Anonimous. 2001. Pengembangan Kelompok Tani Sebagai Unit Ekonomi: Ringkasan Pengkajian. Pusat Pengkajian SDM Pertanian, Badan Pengembangan SDM dan Penyuluhan Pertanian. Jakarta.
- Boeke, J.H. 1982. Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda. dalam Bunga Rampai Perekonomian Desa (Penyunting: Sajogyo). Yayasan Agroekonomika. Bogor.
- Chodjim, A. 2002. Syekh Siti Jenar: Makna "Kematian". P.T. Serambi Ilmu Semesta. Jakarta.
- De Graaf, H.J. 1990. Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung. Grafiti Pers. Jakarta.
- Geertz, C. 1983. Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Bratara Karya Aksara. Jakarta.
- Hagen, E. 1962. On The Theory of Social Change: "How Economics Growth Begins?". The Doorsey, Inc. Illinois.
- Hall, D.G.E. 1988. Sejarah Asia Tenggara. Penerbit Usaha Nasional. Surabaya.

- Hayami, Y dan M. Kikuchi. 1987. Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hidayat, S. 2001. Desentralisasi, Negara Kesatuan, dan Semangat Bhinneka Tunggal Ika. *Harian Media Indonesia*, 10 Desember 2001, hal. 42.
- Husken, E. dan B. White. 1989. Perkembangan Pedesaan. *Prisma* No.4, 1989. LP3ES. Jakarta.
- Inayatullah. 1979. Conceptual Framework for Country Studies of Rural Development. In *Approach to Rural Development: Some Asian Experiences* (edited by Inayatullah. Asian and Pacific Development Administration Center. Kualalumpur.
- Koeswara, E. 2000. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999: Suatu Telaah Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya. *Analisis CSIS*, XXIX(1):36-53. CSIS. Jakarta.
- Kuhn, T.S. 1967. *The Structural of Scientific Revolutions*. Phoenix Books, The University of Chicago Press. Chicago.
- Lauer, R.H. 1982. *Perspectives on Social Change*. Allyn and Bacon, Inc. Boston.
- MacAdreus, C. dan I. Amal. 1995. Hubungan Pusat-Daerah dalam Pembangunan. *Manajemen P.T. Raja Grafindo Persada*. Jakarta.
- Mantra, I.B. 1990. Bali: Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi. Penerbit P.T. Upada Sastra. Denpasar.
- Moore, Jr, B. 1972. *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Beacon Press. Boston.
- Muhaimin, Y.A. 1990. *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. LP3ES. Jakarta.
- Poensioen, J.A. 1969. *The Analysis of Social Change Reconsidered: A Sociological Study*. The Hague. Paris.
- Pranadji, T. 1999. Desentralisasi dan Percepatan Transformasi Agribisnis Secara Berkelanjutan. dalam *Dinamika Inovasi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian* (Editor I.W. Rusastra dkk). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 2001. Otonomi Daerah dan Daya Saing Agribisnis: Pelajaran dari Propinsi Lampung. *Makalah Analisis Kebijaksanaan Kelembagaan Pembangunan Pertanian*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 2001. Pendekatan Sosio-Budaya dalam Transformasi (Pembangunan) Agribisnis Berkelanjutan. Seminar Nasional "Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 ke Depan" di Bogor, 9-10 Nopember 2000. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 2001. Penguatan Lembaga Pedesaan Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan: Operation Enduring (Rural Economic) Freedom (toward Indonesian Economic Freedom). *Makalah pada Pekan Nasional: Pertemuan Kelompok dan Kontak Tani-Nelayan Andalan (PENAS) X-Agribisnis 2001*, 22 Oktober 2001. Tasikmalaya.
- Pranadji, T. 2002. Reformasi Kelembagaan Ekonomi Pedesaan yang Tertunda di Era Otonomi Daerah. Seminar Nasional dan Rekonsiliasi Mahasiswa Pertanian se-Indonesia bertema "Studi Kritis Pembangunan Pertanian dalam Dua Tahun Otonomi Daerah

- Menuju Kesejahteraan Masyarakat Petani" di Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, 22 Mei 2002. Jogjakarta.
- Rahardjo, M.D. 1990. Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rasyid, M.R. 2001. Kegagalan Memahamai Otonomi Daerah. *Harian Media Indonesia*, Senin, 10 Desember 2001, hal. 41.
- Ricklefs, M.C. 1981. *Sejarah Indonesia Modern*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sajogyo. 1974. *Modernization without Development in Rural Java. (A Paper Contributed to the Study on Changes in Agrarian Structure, FAO of UN, 1972-1973)*. Bogor Agricultural University. Bogor.
- Sajogyo. 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Yayasan Agroekonomika. Bogor.
- Scott, J.C. 1989. *Moral Ekonomi Petani : Pengolahan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES. Jakarta.
- Sorokin, P. 1964. *Contemporary Sociological Theories: The First Quarter of Twentieth Century*. Harper and Row Publishers. New York.
- Sudaryanto, T. dan T. Pranadji. 2000. Peran Kewirausahaan dan Kelembagaan (Kemitraan) dalam Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan. dalam *Prosiding Simposium "Tonggak Kemajuan Teknologi Produksi Tanaman Pangan: Konsep dan Strategi Peningkatan Produksi Pangan"*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.
- Taryoto, H.T., A. Mintoro, A. Zulham, T. Pranadji, Rita N.S., G.S. Budhi, T.B. Purwantini, dan B. Sudaryanto. 1993. *Analisis Perubahan Kebijakan Organisasi Ekonomi dalam Bidang Pangan dan Dampaknya Terhadap Produksi, Distribusi, Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Kerja di Pedesaan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1977. *The Organization Phenomenon and Planned Development in Rural Communities of Java: A Case Study of Kecamatan Cibadak, West Java and Kecamatan Kendal, Central Java*. University of Indonesia. Jakarta. (Disertasi).
- Uphoff, N. 1992. *Local Institution and Participation for Sustainable Development*. (Gate-keeper Series No.31).
- Weber, M. 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*, (translated by A.M. Henderson and T. Parson). The Free Press. New York.
- Widjaja, A.W. 1996. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Manajemen P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yasa, I.M. 1997. *Potensi Banjar sebagai Wahana Pembangunan di Bali*. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. (Disertasi).